

**PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI:  
Studi Kasus Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Kota  
Surabaya Provinsi Jawa Timur**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) Dalam Bidang Sosiologi**



**Oleh:**

**IDATUL MAYA**

**NIM. I03214002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**JURUSAN ILMU SOSIAL**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**

**JULI 2018**

# PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Idatul Maya

NIM : I03214002

Progam Studi : Sosiologi

Judul : PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI: Studi Kasus Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 13 Juli 2018



menyatakan

Idatul Maya

NIM: I03214002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Idatul Maya

NIM : I03214002

Program Studi : Sosiologi

Yang berjudul: **“PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI: Studi Kasus Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 13 Juli 2018

Pembimbing



Dra. Hj. Wahidah Zein BR Siregar, MA, Ph.D

NIP. 196901051993032001

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Idatul Maya dengan judul: **“PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI: Studi Kasus Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 23 Juli 2018.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dra. Hj. Wahidah Zein BR Siregar, MA, Ph.D  
NIP. 196901051993032001

Penguji II

Husnul Muttaqin, S.Sos, M.S.I  
NIP. 197801202006041003

Penguji III

Muchammad Ismail, S.Sos, MA  
NIP. 198005032009121003

Penguji IV

Amal Taufiq, S.Pd., M.Si  
NIP. 198005032009121003

Surabaya, 23 Juli 2018

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip. SEA, M.Phil, Ph.D  
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Idatul Maya  
NIM : 103214002  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Sosiologi  
E-mail address : idatulmaya37@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI: Studi Kasus Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2018

Penulis

(Idatul Maya)

















Korupsi yang terjadi saat ini bukanlah suatu tindakan secara kebetulan melainkan telah direncanakan oleh oknum-oknum tertentu pada jangka waktu yang ditentukan pada tahap prosesnya, yang tidak terlepas dari perilaku menyimpang manusia.

Peran aktif masyarakat sangat diutamakan pada upaya pencegahan korupsi dengan cara turut serta membangun budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat. Untuk turut berperan aktif, masyarakat harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk tindak korupsi dan pemberantasannya. Selain itu, masyarakat harus memahami dan menerapkan pentingnya nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Korupsi bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri melainkan menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Begitu juga dengan faktor penyebab korupsi yang tidak hanya hadir dari faktor internal pelaku saja namun bisa juga dari faktor eksternal seperti keadaan lingkungan. Dengan demikian, untuk mencegah dan memberantas korupsi dibutuhkan strategi yang tepat. Salah satunya adalah dengan membentuk gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk perempuan. Saat ini mereka sudah mulai berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi secara massif.

Perempuan selalu dikait-kaitkan sebagai penyebab terjadinya tindakan korupsi. Sehingga dengan adanya stereotip tersebut secara tidak sadar perempuan melakukan pemberontakan melalui gebrakan baru



perubahan juga memiliki peranan sangat penting dalam tindakan pencegahan korupsi.

Gerakan antikorupsi yang dipelopori oleh aktivis perempuan tersebar hampir diseluruh Indonesia. Salah satunya adalah kelompok yang bernama SPAK yang hadir di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang terlihat memiliki cakupan luas tetapi sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari gerakan-gerakan anti korupsi yang telah terbentuk di Indonesia.

Gerakan yang bernama SPAK telah diluncurkan pada tanggal 22 April 2014 dalam bentuk bedah buku dan talkshow. Dan pada tanggal 21 April 2015 dicanangkan sebagai gerakan nasional yang hingga kini melalui program SPAK telah melatih dan menghasilkan kurang lebih 1.600 agen yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Dimasing-masing provinsi/kota/kabupaten memiliki koordinator yang dibebani tanggung jawab oleh koordinator pusat (Jakarta) sebagai penyalur informasi dan komunikasi diantara agen yang lainnya.

Agen SPAK yang kegiatannya selalu mengikutsertakan orang banyak, bersinergi dengan kelompok masyarakat lainnya yang menggeluti isu antikorupsi untuk memasukkan perspektif keadilan gender sebagai salah satu wujud kesetaraan pencegahan korupsi oleh perempuan dan keberhasilan dalam mensosialisasikan perilaku antikorupsi.

Agen SPAK telah tersebar hampir di seluruh penjuru Indonesia. Gerakan antikorupsi yang diajarkan oleh agen SPAK adalah tentang perilaku jujur atau kejujuran yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-

























Gerakan SPAK menyoroti pada peran sosial perempuan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan komunitas karena perempuan dalam berkomunikasi lebih mementingkan hubungan dengan manusia agar mampu memelihara dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Perempuan sebagai komunikator kampanye antikorupsi memegang peranan yang potensial dianggap memiliki atribut kredibilitas sumber dalam isu korupsi.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, penggalan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan agen SPAK.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada teori yang digunakan. Pada penelitian saya menggunakan teori modern yaitu Strukturasi yang diperkuat dengan feminisme Liberal sedang pada penelitian ini menggunakan teori tradisional yaitu kredibilitas sumber. Selain itu pada fokus penelitian saya membahas tentang peran perempuan agen SPAK sebagai gerakan anti-korupsi sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada proses kampanye antikorupsi melalui gerakan SPAK.

2. Penelitian dengan judul **“Partisipasi Aktif Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) dalam Upaya Pendidikan AntiKorupsi di Surabaya”** yang dilakukan oleh Feni Qoriroh dan Maya Mustika Kartika Sari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA pada tahun 2016. Pada penelitian ini sepenuhnya bertujuan mengeksplorasi



penelitian saya memfokuskan pada peran perempuan dalam gerakan antikorupsi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan agen SPAK dalam pencegahan perilaku korupsi seperti peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat dan kegiatan-kegiatan tersebut melalui permainan yang dijelaskan lebih detail. Penelitian ini menggunakan teori Hipotesis Durkheim sedangkan penelitian saya menggunakan teori Strukturasi Giddens dan Feminisme Liberal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Melly Deciana, Prodi Komunikasi Pemasaran dan Periklanan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, tahun 2015. Judul penelitian ini adalah **“Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi”**. Penelitian ini membahas tentang konsep dan strategi pencegahan perilaku korupsi dengan mengubah cara pandang masyarakat mengenai definisi korupsi melalui pemasaran sosial.

Pada penelitian Melly Deciana menggunakan rumusan penelitian tentang konsep dan strategi pemasaran sosial yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) agar lebih efektif dalam pencegahan perilaku korupsi dengan tujuan perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku yang anti korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi pustaka

dan wawancara. Sebagai acuan dalam penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dan pemasaran sosial Kotler.

Dengan hasil temuan dari penelitian ini bahwa konsep dan strategi pemasaran sosial menjadi dasar dalam pelaksanaan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi agar lebih efektif dalam pencegahan perilaku korupsi melalui konsep pemasaran sosial. Melalui survei internal menggunakan peran perempuan sebagai tokoh sentral agen-agen perubahan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu terletak pada konteks peran perempuan sebagai tokoh sentral sebagai agen perubahan dan metode yang digunakan sama-sama melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan datapun melalui wawancara.

Perbedaan penelitian ini memfokuskan pada konsep dan strategi perempuan dalam mencegah korupsi melalui pemasaran sosial dengan menjual produk sosial sedangkan penelitian saya memfokuskan pada peran perempuan dalam gerakan anti korupsi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan agen SPAK.

---

<sup>16</sup> Melly Deciana, (Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi), Skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Komunikasi Pemasaran dan Periklanan Universitas Mercu Buana, 2012, Digilib.mercubuana.ac.id (diakses pada 03/11/2017 pukul 19:26).

























pemberantasan korupsi tersebut diberi nama Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN).

PARAN memiliki kinerja yakni mengharuskan pejabat pemerintah untuk mengisi formulir daftar kekayaan. Namun, dalam perkembangannya ternyata kewajiban mengisi formulir tersebut mendapat protes dari para pejabat, agar formulir tersebut langsung diserahkan kepada presiden.

Pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi mulai digalakkan. Lembaga yang dibentuk bernama “Operasi Budhi”. Lembaga ini memiliki tugas yakni meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja hijau dengan sasaran perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga negara.

Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat terselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar. Ternyata lambat-laun lembaga ini juga mengalami hambatan.

Pada akhirnya, oleh Soebandrio PARAN atau Operasi Budhi ini dibubarkan dan diganti nama menjadi KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) Presiden Soekarno yang ditunjuk sebagai ketuanya yang dibantu oleh Subandrio dan Letjen Ahmad Yani. Lembaga ini juga terhentikan karena dianggap mengganggu Prestise Presiden.





KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo, Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.

Di samping membubarkan TGPTPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kegemaran beliau melakukan pertemuan-pertemuan di luar agenda kepresidenan bahkan di tempat-tempat yang tidak pantas dalam kapasitasnya sebagai presiden, melahirkan kecurigaan masyarakat bahwa Gus Dur sedang melakukan proses tawar-menawar tingkat tinggi.

Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate. Gus Dur



















mengenai Peran Perempuan dalam Gerakan Antikorupsi. Dalam teori strukturasi yang berfokus pada hubungan struktur dan pelaku (agen) bahwa titik tolak analisis adalah praktik atau tindakan manusia yang ditekankan pada keagenan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Agen SPAK oleh perempuan dalam gerakan antikorupsi. Agen SPAK dalam kegiatannya tidak hanya melakukan penyuluhan dan sosialisasi saja melainkan mereka juga membuat aksi dengan media-media yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentunya media yang digunakan oleh Perempuan Agen SPAK sangat menarik karena semua kalangan usia bisa menggunakannya.

Dalam tindakan yang dilakukan oleh perempuan Agen SPAK masuk dalam komponen penting teori ini tentang kesadaran. Mereka tidak hanya memiliki kesadaran untuk menjauhi perilaku korupsi pada dirinya sendiri tetapi mereka juga harus mampu mempraktikkan pada dirinya dan membaginya pada orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan Agen SPAK tidak semata-mata hanya bentuk permainan dan cara memainkan saja akan tetapi para agen harus mampu menjelaskan makna yang terdapat dalam permainan SPAK sebagai dasar pencegahan perilaku korupsi tersebut.

## 2) Teori Feminis Liberal

Gerakan feminis liberal berawal dari tokoh Alison Jaggar, dalam *Feminist Politics and Human Nature* yang mengamati bahwa pemikiran











Keterangan Bagan 2.1, yang menjelaskan tentang peta alur berfikir teori strukturasi dan teori feminisme liberal dalam konteks dua teori tersebut dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua teori yaitu teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens dan teori Feminisme Liberal. Kemudian peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan bagan diatas bahwa terdapat fokus pembahasan dari masing-masing teori yang memiliki kesinambungan dan saling menguatkan.

Bagan tersebut menjelaskan bahwa dalam teori Strukturasi terdapat fokus pembahasan tentang pelaku (agen) dan struktur yang dijadikan sebagai kajian penting yang terhubung dalam ruang dan waktu. Untuk mencapai batas ruang dan waktu tersebut terdapat tindakan sosial yang dilakukan oleh personal ataupun kelompok.

Melalui tindakan sosial yang dilakukan oleh personal ataupun kelompok tersebut secara berulang melewati ruang dan waktu akan menghasilkan praktek sosial yang membentuk sebuah struktur dan melibatkan agen didalamnya. Kemudian dalam sebuah struktur tersebut akan ada yang menghambat dan bersifat memberdayakan sehingga akan menumbuhkan kesadaran praktis dan kesadaran diskursif kepada agen.

Kemudian setelah beberapa unsur terwujud, barulah akan terbentuk Struktur Sistem Sosial SPAK. Untuk memperkuat teori Strukturasi tersebut maka peneliti menggunakan teori Feminisme Liberal dengan alasan karena kajian yang







### C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subjek penelitian disebut dengan informan. Untuk mencari informasi dengan kondisi tersebut peneliti melakukan pencarian data melalui informan kunci yang selanjutnya mengikuti arahan dari informan kunci tersebut. Mengingat subyek penelitian merupakan faktor terpenting bagi peneliti untuk memperoleh data secara mendalam. Jumlah subyek penelitian disini ada 8 orang, terdiri dari 3 informan utama dan 5 informan pendukung. Alasan peneliti melakukan pemilihan jumlah 8 orang sebagai subyek penelitian karena telah mampu menjawab semua data peneliti. Peneliti memilih subyek penelitian berdasarkan tiap-tiap profesi atau jabatan, seperti dosen, PNS, mahasiswa, ibu rumah tangga.

Peneliti menggunakan prosedur *snowball* dan metode porposif. Artinya dalam penelitian ini jumlah informan dapat bertambah seiring berjalannya penggalan data. Sebelumnya peneliti telah melakukan perencanaan tentang informan tetapi ketika peneliti melakukan penggalan data diperkenalkan kepada informan baru oleh informan pertama.

Peneliti juga menyertakan surat izin penelitian yang ditujukan kepada Ketua/ Koordinator SPAK Surabaya sebagai legalitas dalam penelitian. Berikut daftar keseluruhan informan dalam penelitian antara lain:

















dalam pengambilan kesimpulan tahap awal masih bersifat sementara dan bisa berubah ketika data yang ditemukan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena keakuratan data berpengaruh pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka merupakan kesimpulan yang kredibel dan valid.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses pengumpulan data. Dalam penarikan kesimpulan peneliti mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh perempuan agen SPAK.

### **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian. Penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi jika peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan tehnik sesuai dengan sub-bab yang diuraikan. Dengan demikian, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan yang didasarkan atas empat kriteria, yaitu kepercayaan, keterahlian, kebergantungan, dan kepastian.

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas. Data yang dianggap valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti













kasus korupsi yang melibatkan perempuan didalamnya. Awal peluncuran SPAK di Jakarta dikemas dalam bentuk bedah buku dan talkshow dengan para perempuan-perempuan hebat sebagai Narasumber seperti Ibu Meuthia Hatta, Dian Kartika Sari selaku Sekjen KPI, dan Ibu Yuyun PNS Inspektorat Kota Pemkot Mataram di NTB. Dan dilanjutkan dengan kegiatan bedah buku “Saya Perempuan Anti Korupsi” dipimpin oleh seorang dosen FH UI yaitu Gandjar Laksamana Bonaprpta yang didampingi Busyro Muqoddas yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2010-2011. Acara bedah buku dan talkshow berjalan dengan lancar dan meriah.

Sedangkan peluncuran SPAK Surabaya diawali dengan kegiatan TOT pada tanggal 27-29 Mei 2015 di Hotel Sheraton Surabaya yang dihadiri oleh perempuan-perempuan dari berbagai elemen termasuk PNS, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, kader PKK, Dharma Wanita, LSM, Jurnalis, bahkan organisasi keagamaan. Sehingga tepat pada tanggal 29 Mei diperingatilah sebagai hari lahir SPAK Kota Surabaya.

Tehnik pemberantasan korupsi yang berbeda dilakukan oleh SPAK dan KPK menjadi penunjang kesadaran masyarakat terutama perempuan tentang dampak yang diakibatkan perilaku koruptif. Gerakan SPAK melakukan pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan melalui pendidikan moral sedangkan KPK melakukan

pemberantasan korupsi dengan cara penindakan dan usut tuntas tindak koruptif.

Berdasarkan evaluasi tahunan SPAK yang pertama tahun 2015, dilakukan sebuah penelitian atau survei mengenai perilaku korupsi dengan tema korupsi berbasis keluarga, selama tahun 2012-2013 data yang diperoleh KPK di kota Solo dan Jogjakarta hanya terdapat empat persen perempuan atau orang tua yang mengajarkan kepada anaknya tentang kejujuran pada tindakan sehari-harinya. Sedangkan data yang diperoleh Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) terdapat enam puluh Sembilan persen responden yang mengatakan bahwa seorang istri ketika memperoleh uang dari suami yang melebihi gajinya tidak pernah menanyakan asal-usul dari uang tersebut karena menanyakan dianggap sebagai hal yang “tabu” atau dianggap “tidak sopan”. Maka, dari sinilah sebenarnya bisa muncul perilaku korupsi.

Melihat hasil survei yang dilakukan oleh KPK dan IPAK 2 tahun lalu, maka fakta ini memberikan kesempatan luas bagi perempuan untuk dijadikan sebagai tokoh sentral dalam pencegahan tindakan korupsi. Mengingat, pendidikan moral keluarga dimulai dari perempuan atau ibu. Kondisi inilah yang menjadi dasar terbentuknya gerakan anti-korupsi yang dikenal dengan SPAK.

Di Indonesia, perempuan atau ibu dianggap memiliki peranan kunci dalam memberikan pendidikan pada keluarganya atau anak-anaknya terutama tentang penanaman nilai-nilai dan moral keluarga.













Tabel 4.1 Badan Pengurus SPAK

| NO | KEWENANGAN                                   | KETERANGAN   |
|----|--|--|
| 1. | KPK dan AIPJ                                 | KPK dan AIPJ sebuah mitra yang membawahi setiap pergerakan SPAK  |
| 2. | Koordinator SPAK Pusat /<br>Tingkat Nasional | Memiliki tanggung jawab kepada setiap koor dibawahnya serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan KPK dan AIPJ berkaitan kegiatan SPAK     |
| 3. | Koordinator SPAK<br>Tingkat Provinsi         | Memiliki tanggung jawab melakukan komunikasi dan koordinasi dengan koor Pusat dan disosialisasikan kepada setiap koor Kabupaten /Kota          |
| 4. | Koordinator SPAK<br>Tingkat Kota/Kabupaten   | Memiliki tanggung jawab melakukan komunikasi dan koordinasi dengan koor Provinsi dan disosialisasikan kepada seluruh fasilitator dan agen SPAK |
| 5. | Fasilitator dan Agen SPAK                    | Memiliki tugas menggerakan   |















anti korupsi dan informasi tentang pencegahan perilaku koruptif telah dirancang dan dilakukan oleh para agen SPAK Surabaya, kegiatan yang telah dilakukan agen SPAK Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada kader PKK di 31 Kecamatan
2. Sosialisasi melalui Media, baik cetak maupun elektronik serta media sosial
3. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Pimpinan dan anggota Dharma Wanita
4. Sosialisasi kepada mahasiswa dalam materi perkuliahan
5. Kegiatan sosialisasi pada pengajian baik dewasa maupun anak-anak
6. Sosialisasi dan pelatihan ke sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi
7. Sosialisasi nilai anti korupsi melalui permainan semai bagi siswa SD dalam kegiatan PERTURA
8. Sosialisasi nilai anti korupsi dalam kegiatan PERTURA (stand tersendiri)
9. Sosialisasi dalam kegiatan KLINIK INVESTASI di BKPPM Kota Surabaya
10. Pelatihan permainan SEMAI bagi perwakilan IGTKI dari 31 Kecamatan Kota Surabaya











Berkaitan dengan peran perempuan dalam kegiatan SPAK tersebut peneliti melakukan analisis data menggunakan dua teori yaitu teori Strukturasi dan Feminis liberal. Dengan pemaparan sebagai berikut:

### **C. Analisis Data Tentang Peran Perempuan dan Kiprah Agen SPAK dalam Tinjauan Teori Strukturasi dan Feminisme Liberal**

Perempuan dalam lingkungan keluarga melakukan pekerjaan domestik seperti memasak, mengurus anak, suami dan mengurus rumah dianggap sebagai pekerjaan utama. Namun, disisi lain perempuan harus mampu menyiapkan dirinya untuk bersaing dengan dunia publik agar tidak mengalami ketertinggalan.

Untuk mempersiapkan dirinya dalam ranah publik perempuan juga membutuhkan peran serta laki-laki untuk memberikan dukungan penuh dalam bidang materiil maupun non-materiil terlebih finansial. Karena untuk keluar dari dunia pribadi perempuan tidaklah mudah, ada beberapa tanggung jawab yang harus dikesampingkan. Dengan demikian, perempuan membutuhkan pengganti untuk mengalihkan tugas-tugas yang telah ditinggalkan saat berada diluar rumah.

Gerakan-gerakan feminisme ini muncul ketika banyak perempuan yang menyadari begitu pentingnya keterlibatan mereka dalam dunia publik seperti gerakan antikorupsi yang didalamnya melibatkan perempuan hampir sepenuhnya. Dengan asumsi bahwa perempuan akan memperoleh kesempatan dan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Namun, tidak jarang kaum laki-laki merasa tidak nyaman dengan

keterlibatan perempuan berkegiatan diluar rumah, karena mereka harus turut serta terlibat dalam urusan domestik yang seyogyanya menjadi urusan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pencegahan korupsi yang menumbuhkan kesadaran penuh, maka mampu bergerak secara berulang dalam lingkup ruang dan waktu. Sehingga keterlibatan perempuan tersebut tidak hanya bergerak secara personal saja namun mampu bergerak dengan kelompok. Dengan demikian akan muncul tindakan-tindakan sosial yang dihasilkan oleh gerakan personal dan kelompok tersebut.

Dalam kegiatan pencegahan korupsi sebenarnya tidak hanya membutuhkan keterlibatan perempuan saja. Namun, laki-laki juga memiliki hak terlibat didalam kegiatan tersebut. Mengingat perempuan tidak akan bergerak luas jika tidak adanya motivasi dari laki-laki. Begitupun tindakan yang dilakukan perempuan, kaum laki-laki juga memiliki kesempatan untuk melakukannya. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh gerakan Saya Perempuan Anti-Korupsi sebagai gerakan pencegahan korupsi. Meskipun tampaknya feminin dengan kata “Saya Perempuan” namun tidak ada batasan antara laki-laki ataupun perempuan didalamnya.

Melalui kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kasus pencegahan korupsi dengan komunikasi dan interaksi sosial yang baik dan mampu saling mempengaruhi maka akan



sumber daya yang diberdayakan sebagai ketahanan sosial yang mampu menjalin relasi dengan ranah publik sebagai agen anti-korupsi.

Dalam teori Strukturasi Giddens tentang dualistik dimensi ruang dan waktu yang bergerak berulang dalam praktek sosial sehingga menghasilkan tindakan sosial personal ataupun kelompok. Perempuan dalam melakukan tindakannya pun memiliki tujuan dan tujuan yang dilakukan memiliki unsur kesengajaan. Melalui unsur kesengajaan maka akan ada konsekuensi yang tidak sengaja diterima dan berdampak pada tindakan selanjutnya.

Agen anti-korupsi berperan serta dalam kegiatan pemberantasan korupsi melalui penyuluhan, sosialisasi, propaganda media dan aksi. Propaganda media yang dilakukan agen anti-korupsi yaitu menyebar luaskan delik-delik perilaku anti-korupsi pada media sosial, media cetak maupun elektronik. Ketika perempuan tidak mampu mempertahankan dirinya dari perilaku anti-korupsi maka mereka akan keluar dari agen dengan sendirinya karena mereka merasa telah kehilangan kemampuan dalam membatasi sebuah perbedaan.

Struktur sebagai sarana berlangsungnya praktek sosial terwujud dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan agen SPAK melalui berbagai bidang dan media. Tidak hanya sebatas sosialisasi dan penyuluhan melainkan memberikan kontribusi langsung tentang keberadaan nilai-nilai anti-korupsi kepada generasi mendatang yang



*Dominasi*, dalam prinsip ini perempuan harus memiliki penguasaan mencakup orang dan barang. Artinya ketika perempuan telah bergabung sebagai agen SPAK maka ia harus bergerak tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga harus mengusung lingkungan sekitarnya termasuk lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat agar terhindar dari perilaku koruptif. Perempuan agen SPAK sebelum terjun ke lapangan harus memiliki bekal materi sebagai bahan sosialisasi, penyuluhan ataupun aksi.

*Legitimasi*, ketika menyangkut tindakan koruptif maka akan berkaitan dengan tata hukum yang didalamnya terdapat peraturan normatif. mayoritas yang bergabung sebagai agen SPAK bukanlah orang yang buta korupsi melainkan mereka adalah orang-orang yang sering bersebrangan dengan perilaku korupsi. Sebagai wadah aktivitas dalam pencegahan korupsi, agen SPAK berusaha belajar taat pada hukum dan membentengi diri dari perilaku koruptif dengan cara sadar hukum.

Keberadaan perempuan agen SPAK sedikit banyaknya telah menginspirasi pada lingkungan publik, membantu sebuah sistem dalam masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung dalam penuntasan perilaku korupsi melalui gerakan pencegahan.

## 2. Peran Perempuan Agen SPAK dalam Gerakan Anti Korupsi Tinjauan dari Teori Feminis Liberal

Dalam analisa Feminisme Liberal kasus diatas mengarah pada usaha perempuan untuk keluar dari zona nyaman dalam menjalankan peran sebagai istri atau ibu dalam rumah tangga yang selalu disugahi dengan urusan domestik semata. Perempuan ingin keluar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, berperan aktif dalam ranah publik sebagaimana laki-laki. Perempuan menginginkan kesempatan yang sama untuk meniadakan ketertinggalan. Mengingat dalam kasus ini perempuan memiliki keterlibatan yang besar. Sepenuhnya perempuan yang menjadi pondasi dalam gerakan anti-korupsi ini.

Ketika perempuan harus menerima stereotip yang sebelumnya menganggap bahwa perempuan sebagai faktor penyebab tindakan korupsi dalam rumah tangga atau keluarga. Perempuan kini harus bergerak dan meminimalisir stereotip tersebut bahwa sesungguhnya perempuan juga mampu menghindari perilaku tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan masyarakat umum seperti penyuluhan tentang dampak dari perilaku koruptif, membentengi diri dan keluarga agar tidak terjerumus dalam perilaku korupsi. Tentunya dengan mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, itu semua tidaklah mudah. Keluar dari kebiasaan perempuan untuk mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki

maka akan ada dampak yang dirasakan baik dari laki-laki atau perempuan. Ketika dalam lingkungan masyarakat terdapat subordinasi tentang perempuan maka fungsi dan peran perempuan hanya sebatas ibu dan istri di dalam rumah dan posisi perempuan sebagai pelengkap tanpa terlibat dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial masyarakat. Dengan demikian perempuan akan jauh tertinggal dari laki-laki, sehingga perempuan dalam Feminisme Liberal ini menolak adanya subordinasi agar perempuan memiliki fungsi dan peran yang sama dalam masyarakat tanpa memandang perbedaan jenis kelamin.

Melalui teori Feminisme Liberal perempuan memiliki hak yang sama berada sejajar dengan laki-laki bahwa tidak hanya laki-laki yang mampu berperan diluar rumah melainkan perempuan juga mampu menjadi agen perubahan bagi dirinya, keluarga, lingkungan sosial dan masyarakat. Dengan adanya gerakan anti-korupsi sebagai agen pencegah korupsi perempuan memiliki peran strategis untuk mengubah stereotip negatif yang diciptakan masyarakat selama ini.

Keterlibatan perempuan dalam gerakan anti-korupsi tidak hanya membantu keluarga lepas dari perilaku korupsi. Namun juga membantu negara dalam melepaskan diskriminasi terhadap perempuan karena sejatinya antara laki-laki dan perempuan tidak ada instansi yang membatasi kecuali kemampuan yang dimiliki. Perempuan tidak hanya dianggap sebagai aksesoris dalam rumah tangga saja. Akan tetapi,

perempuan bisa menjadi partner terlebih dalam kegiatan pencegahan koruptif.

Dalam kaitannya dengan Feminisme Liberal gerakan pencegahan korupsi tidak lagi menjadi ranah pribadi melainkan masuk pada ranah publik berkaitan dengan ketahanan negara. Antara peran perempuan dan pria laki-laki harus saling bekerjasama dan seimbang berjalan beriringan demi terwujudnya masyarakat bersih dari perilaku korupsi. Jika diantara keduanya ada yang tidak berperan maka akan sulit mewujudkan hal tersebut.

Perempuan memilih untuk bergerak sesuai kemampuannya, sebagai agen anti-korupsi mengaplikasikan kegiatannya dalam lingkungan keluarga maupun publik. Perempuan tetap bergerak menjadi agen SPAK namun tidak mengesampingkan perannya sebagai ibu atau istri dalam rumah untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya. Karena sesungguhnya gender dan peran perempuan tidak ada batasannya dalam lingkup keluarga ataupun lingkup publik. Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasan yang mengikat. Perempuan memiliki hak mengajak masyarakat atau perempuan-perempuan lain untuk bergerak mandiri turut berpartisipasi aktif dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dan menolak perilaku korupsi melalui lingkup terkecilnya yaitu keluarga. Agar perempuan tidak berada dalam keterbelakangan.



koruptif. Kegiatan SPAK mampu merubah kebiasaan perempuan yang awalnya tidak peduli dengan keberadaan perilaku koruptif disekitarnya, kini dengan keberadaan kegiatan tersebut perempuan lebih mawasdiri dan aktif.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh gerakan SPAK meliputi TOT dan sosialisasi kepada masyarakat. Program TOT (*Training For Trainer*) merupakan kegiatan pembekalan dan pelatihan kepada fasilitator dan agen SPAK selama 3 hari. Yang didalam kegiatannya agen dibekali pengetahuan tentang delik-delik korupsi dan pengenalan alat-alat bantu permainan SPAK seperti semai, arisan, put-put LK, majo dan trata. Dalam gerakan SPAK terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penyuluhan, sosialisasi dan aksi.

Penyuluhan yang dilakukan agen SPAK yaitu dengan menjalin kerjasama melalui instansi pemerintahan atau kegiatan yang berkaitan dengan gerakan anti korupsi lainnya seperti himbauan tentang delik-delik anti korupsi atau sekedar berbagi pengalaman tentang pentingnya peran perempuan dalam gerakan anti korupsi.

Sosialisasi yang dilakukan agen SPAK yaitu dengan memperkenalkan pada masyarakat tentang keberadaan gerakan SPAK. Dan aksi yang dilakukan agen SPAK berupa kegiatan-













